

HUMANISTIC DERADICALIZATION BY ABRAHAM MASLOW APPROACH (Terrorism Counter-measures Strategy in Lingkar Perdamaian Foundation)

Aditia Muhammad Noor

Universitas Brawijaya

Email: maditia608@ub.ac.id

Nailul Fauziyah

UIN Maulana Malik Ibrahim

Email: nailulfauziyah@uin-malang.ac.id

Abstract

Deradicalization is interpreted as a step to return the paradigm of exclusivity towards an understanding of inclusiveness. However, in practice, deradicalization is only carried out at a normative level, namely changing the paradigm. In fact, if explored more deeply, deradicalization should touch the background of the involvement of terrorist groups. This study not only discusses the steps of deradicalism as a form of guidance and protection for former terrorists so that they can be rehabilitated but also provides an ideal deradicalization solution by exploring the motives of the aspects that influence it. This research was conducted at the Lingkar Perdamaian Foundation, one of the institutions that participated in the deradicalization program, thus presenting two questions; what is the deradicalization strategy at the Lingkar Perdamaian Foundation, and how the implications of this deradicalization are carried out. To obtain these answers, this study used descriptive qualitative methods by conducting interviews, observations, and documentation as data collection tools. This research shows the strategy carried out by the Lingkar Perdamaian Foundation into three things; first, through ideological development, assistance to families of ex-terrorist convicts, and economic recovery. All of these strategies are measured based on needs, as Abraham Maslow's theory regarding the hierarchy of needs, the availability of the above needs is intended so that they do not repeat the terror in their past, this will change the perspective of extremist ideology to a tolerant ideology. The implications of deradicalization at the Lingkar Peace Foundation are marked by the opening of an inclusive understanding that accepts all forms of differences in religious views and

believes in the Unitary State of the Republic of Indonesia as the legitimate homeland.

Keywords: deradicalization; humanistic; radicalism; terrorism

Abstrak

Deradikalisasi dimaknai sebagai langkah untuk mengembalikan kembali paradigma eksklusifitas menuju pemahaman inklusifitas. Akan tetapi dalam praktiknya, deradikalisasi hanya dilakukan pada level yang normatif, yakni sekedar merubah paradigma. Padahal jika ditelusuri lebih dalam seharusnya deradikalisasi menyentuh latarbelakang keterlibatan kelompok teroris. Kajian ini bukan hanya membahas mengenai langkah deradikalisme sebagai bentuk pembinaan dan perlindungan bagi mantan teroris agar dapat direhabilitasi, tetapi juga memberi solusi deradikalisasi ideal dengan menelusuri motif aspek yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Lingkar Perdamaian, salah satu lembaga yang turut melakukan program deradikalisasi, sehingga menghadirkan dua pertanyaan; bagaimana strategi deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP), dan bagaimana implikasi deradikalisasi tersebut dilakukan. Untuk memperoleh jawaban tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menunjukan strategi yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian kedalam tiga hal; pertama, melalui pembinaan ideologi, pendampingan keluarga mantan napiter dan pemulihan ekonomi. Semua strategi ini diukur berdasarkan kebutuhan, sebagaimana teori Abraham Maslow mengenai *hierarchy of need*, ketersediaan kebutuhan di atas dimaksudkan agar mereka tidak kembali mengulangi teror di masa lalu, hal ini akan mengubah cara pandang ideologi ekstrimis menuju ideologi toleran. Adapun implikasi dari deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian ditandai dengan terbukanya pemahaman inklusif yang menerima segala bentuk perbedaan dalam pandangan agama serta meyakini NKRI sebagai tanah air yang sah.

Kata Kunci: deradikalisasi; humanistik; radikalisme; terorisme

Pendahuluan

Terorisme merupakan ideologi ekstrimis yang melakukan seruan jihad semata-mata untuk melawan kelaliman dan kemungkaran dengan cara kekerasan atas nama agama. Meski aksi terorisme sepanjang tahun 2018 hingga 2020 mengalami

penurunan,¹ namun aksi tersebut tetap bersifat *hit and run* yang perlu diwaspadai. Padahal agama adalah pengatur norma-norma, tata kehidupan agar dapat berdampingan satu dengan yang lainnya.² Agama tidak lain adalah ajaran cinta yang dapat memberikan kedamaian bagi setiap pemeluknya.³ Agama harus diartikan sebagai pesan damai yang menumbuhkan kasih sayang pada setiap manusia. Sebaliknya, jika agama dimaknai sebagai jalan kekerasan, maka agama akan hidup penuh dengan ajaran kebencian.

Salah satu ancaman agama adalah munculnya kelompok terorisme yang menyebarkan bibit-bibit radikalisme di semua sektor.⁴ Kelompok radikal pada dasarnya adalah potret seseorang

¹ Penurunan 57% Ini Bukan Berarti Dinilai Aman, Aksi-Aksi Terorisme Akan Selalu Tetap Berlanjutnya Selama Agama Hanya Dimaknai Sebagai Landasan Politik Semata. Untuk Itulah Upaya Menangkal Gerakan Ini Diperlukan Pemahaman Keagamaan Yang Lebih Mengedepankan Sikap Toleransi Mengedepankan Persatuan Dan Kesatuan Di tengah Masyarakat Yang Plural. Pemerintah Perlu Mencegah tindakan Terorisme Ini Melalui Regulasi Yang Dinilai Efektif. Selain Itu Peran Pemuka Agama Harus Memberikan Pelajaran Kegaman Yang Harmonis Dan Toleran. *Libat*, <https://www.bnpt.go.id/>.

² Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2016, <https://doi.org/10.17509/Jpis.V23i2.1616>. 67

³ Aditia Muhammad Noor, "Pendidikan Islam Rahmat Li Al-'Alamin Dan Implikasinya Terhadap Karakter (Studi Pesantren Metal Mulim Al-Hidayah Pasuruan)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.36667/jppi.V9i1.603.32>

⁴ Dalam riset yang dirilisnya dari PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) pada oktober 2018 lalu melakukan survei pada guru di seluruh indonesia sebanyak 2.237 guru agama. Dari hasil yang didapat bahwa setidaknya terdapat 37,77 % sikap intoleran dan 41,26 % memiliki pemahaman radikal. Kemudian pandangan guru-guru tersebut mengenai hubungan agama dan sosial, terdapat 56% guru tidak setuju non muslim mendirikan sekolah, 21% tidak setuju tetangga non muslim, 33% menganjurkan orang berperang menegakkan negara Islam dan yang lebih ironis 29% menyatakan setuju untuk berjihad di suriah, palestina dan negara islam lainnya. *Libat*, Alamsyah Ahmad Nurcholish, *Agama Cinta-Menyelami Samudera Cinta Agama-Agama* (Elex Media Komputindo, 2015); Syaugi Syaugi, Badrian Badrian, and Faisal Mubarak, "Peran Kearifan Lokal Dalam Upaya Deradikalisasi Faham Radikal Di Kalimantan Selatan," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (2020): 72.

yang mengalami kondisi yang tidak sehat atas pemikirannya yang menghalalkan untuk melakukan tindak kekerasan. Puncak dari irasionalitas pikiran ini berujung pada tindak terorisme atas nama Tuhan.

Untuk itu, diperlukan langkah deradikalisasi khususnya bagi pelaku terorisme agar dapat dilakukan pembinaan dan pendampingan sebagai *treatment of paradigm* untuk tidak kembali melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi deradikalisasi sering dimaknai sekedar perubahan pemahaman keagamaan semata, seperti halnya pandangan Najahan bahwa deradikalisasi merupakan upaya mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal. Padahal jika melihat kondisi yang paling *real*, bahwa deradikalisasi juga perlu melihat fakta empiris yang mengindikasikan kelompok tersebut dalam dimensi sosiologis yang dianggapnya tidak adil dan menjadi alasan utama lahirnya gagasan terorisme.

Abuddin Nata dalam catatan Fakhurrazi menyebutkan setidaknya ada empat faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan radikalisme-terorisme; *pertama*, munculnya modernisasi yang berpotensi menggesernya nilai-nilai agama. *Kedua*, pandangan politik yang tidak sejalan dengan ideologi yang diusungnya. *Ketiga*, kekecewaan terhadap kondisi sosial ekonomi yang tidak merata. *Keempat*, faktor ideologi yang cenderung skriptualis dan bersifat rigid (kaku).

Dari sini dapat dilihat bahwa untuk melakukan deradikalisasi juga harus melihat faktor apa yang melatarbelakangi gagasan tersebut. Salah satunya kekecewaan terhadap status sosial dan ekonomi kelompok radikal yang tidak terpenuhi, sehingga melakukan tindakan kekerasan atas nama Tuhan. Meskipun Sukawarsini Djelantik menyebutkan dirinya tidak sepakat jika terorisme diakibatkan karena kesenjangan ekonomi. Menurutnya, perubahan tersebut tidak bersifat absolut dan tidak selalu menghasilkan aksi-aksi teror. Kemiskinan dan persoalan ekonomi

adalah hal yang berbeda dan bisa diselesaikan dengan mekanisme tersendiri yakni melalui eskapisme sosial.⁵

Akan tetapi, Olaniyi Evans juga menyangkal bahwa ekonomi yang lemah dan kesenjangan sosial adalah refleksi dari ketidakadilan sistem yang berlaku. Itulah sebabnya mengapa marginalisasi ekonomi, kesenjangan sosial, keputusan dan frustrasi melahirkan gerakan ekstrimisme dan mengarah pada terorisme.⁶ Senada dengan Hamisu Salihu yang mengatakan bahwa faktor ekonomi kemiskinan, pengangguran, buta huruf dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tidak dapat dikesampingkan sebagai penyebab terorisme.⁷

Untuk itu, diperlukan perubahan pola pikir dalam program deradikalisasi ini melalui ketercukupan kebutuhan yang menjadi latar belakang mereka. Perubahan sikap seseorang dapat dilakukan dengan beberapa faktor, sebagaimana konsep *Hierarchy of Need* yang diusung oleh Abraham Maslow. Adapun hirarki kebutuhan menurutnya sebagai berikut: (1) fisiologis (dasar), (2) kebutuhan rasa aman dan tentram, (3) kebutuhan dicintai dan disayangi, (4) kebutuhan dihargai dan (5) kebutuhan aktualisasi diri.⁸ Pada level psikologi yang normal biasanya manusia akan lebih leluasa berubah dan mengaktualisasikan diri jika sederet kebutuhan diatas dapat terpenuhi.

⁵ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional* (Jakarta: Pustaka Obor, 2010),105.

⁶ Olaniyi Evans And Ikechukwu Kelikume, "The Impact Of Poverty, Unemployment, Inequality, Corruption And Poor Governance On Niger Delta Militancy, Boko Haram Terrorism And Fulani Herdsmen Attacks In Nigeria," *International Journal Of Management, Economics And Social Sciences* 8, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.32327/Ijmess/8.2.2019.5>; Javier Gardezabal, "Terrorism And Poverty," In *International Relations*, 2020, <https://doi.org/10.1093/Obo/9780199743292-0296>.

⁷ Hamisu Salihu, "Is Boko Haram A 'Child' Of Economic Circumstances?," *International Journal Of Social Economics* 45, No. 8 (2018), <https://doi.org/10.1108/Ijse-12-2017-0573.11>

⁸ Iskandar, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2009), 115.

Sebaliknya, dalam konteks deradikalisasi perubahan kelompok mantan napiter tidak akan berjalan maksimal jika aspek kebutuhan seseorang masih belum tercukupi. Sehingga memungkinkan seseorang kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang teroris,⁹ hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan esensial yang tidak selesai.

Maslow menyusun teori kebutuhan manusia dalam bentuk hirarki berjenjang. Dalam pandangan umum, kebutuhan manusia harus diprioritaskan berdasarkan level terendah, namun sangat memungkinkan jika kebutuhan itu berbanding terbalik. Misalnya, pengalaman masa lalu, yang mendorong dirinya untuk membutuhkan rasa aman. Termasuk seseorang yang memiliki bakat tetapi tidak ada dorongan dari orang sekitar, sehingga yang dia butuhkan adalah “pengakuan dan keterlibatan” sosial untuk mengaktualisasikan dirinya. Ini menunjukkan bahwa seseorang memprioritaskan ide atau kebutuhan tertentu meski harus mengabaikan kebutuhan fisiologisnya. Sehingga perubahan seseorang harus ditopang berdasarkan kebutuhan dirinya. Inilah yang bagi Maslow diidentifikasi dengan perubahan humanistik.

Untuk itulah, deradikalisasi harus memiliki strategi dan pola yang menarik, bukan hanya menangani persoalan ideologi, tetapi semua aspek yang melatarbelakangi mantan teroris juga harus diperhatikan. Jika deradikalisasi hanya menyentuh aspek normatif maka sangat dimungkinkan para di luar sana dirinya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.¹⁰ Upaya penanggulangan pelaku teroris dapat diselesaikan dengan cara-cara humanis, yang dilakukan secara integratif dengan tidak memisahkannya dari latarbelakang persoalan. Sehingga selain merehabilitasi untuk

⁹ Mikhail Zelenkov Et Al., “How To Lower The Possibility Of Terrorism Development In Democratic Society?,” *Justicia* 26, No. 39 (2021), <https://doi.org/10.17081/just.26.39.4909.28>

¹⁰ Muhammad R Bakashmar, “Extremist Deradicalisation Programmes: A Comparative Perspective,” *International Journal Of Political Science, Law And International Relations*, (2015), 15.

menjadi manusia yang sesungguhnya, kita akan mengetahui bagaimana pergerakan dan doktrinasi kelompok teroris tersebut digencarkan, sehingga menjadi langkah preventif.¹¹

Lokasi penelitian ini dilakukan di organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan deradikalisasi bagi mantan terorisme, yakni Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP), dimana lembaga ini didirikan sebagai wadah bagi mantan teroris agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran. Selain itu lembaga ini didesain khusus sebagai pusat pendidikan bagi pelaku mantan terorisme agar tidak mengalami tindakan diskriminasi di tengah masyarakat. Lembaga yang bergerak dalam program deradikalisasi ini berhasil menjadi representasi dengan penanganan terorisme terbaik yang bersifat humanis. Mengarahkan mantan napiter bukan sekedar memahami ajaran moderat, tetapi bagaimana memberdayakan kelompok tersebut untuk lebih kreatif dan mandiri pasca pidana.

Yayasan ini berhasil menciptakan stigma positif bahwa perlakuan terhadap mantan terorisme harus dilakukan dengan cara yang humanis, melalui pemahaman agama, pelatihan dan wawasan kebangsaan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan pandangan negatif bagi mantan terorisme di tengah masyarakat.¹² Keberadaan mantan terorisme perlu perhatian khusus melalui rehabilitas moral dan pemahaman keagamaan yang inklusif. Selain itu, alasan menarik mengapa peneliti memilih objek tersebut karena Yayasan Lingkar Perdamaian didirikan oleh seorang mantan teroris, sehingga deradikalisasi menjadi lebih terukur yang disesuaikan berdasarkan basis pengalaman.

¹¹ Rafika Nurul Hamdani Ramli, "The Eradication Of Terrorism Acts: Effectiveness And Human Rights Violation," *International Journal Of Global Community* (2018), 22.

¹² Jerry Indrawan And M. Prakoso Aji, "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561.35>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) strategi deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP); (2) implikasi strategi deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP). Sementara itu, kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun informannya terdiri dari kepala yayasan, pengurus dan beberapa anggota. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman dengan beberapa unsur, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹³ Reduksi ini digunakan sebagai proses pemusatan data dari hasil temuan lapangan, kemudian masuk pada penyajian data yang disusun secara terstruktur agar mudah dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Seputar Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP)

Lingkar perdamaian merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang deradikalisasi dan deterorisme. Kegiatan ini dilakukan oleh mereka yang pernah tergabung dalam kelompok teroris nasional hingga internasional. Terbentuknya Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) dipelopori oleh Ali Fauzi yang merupakan adik kandung Ali Ghufron, Amrozi dan Ali Imron. Secara historis, Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) berawal dari pasca-bebas nya mantan terorisme pada tragedi Bom Bali I, yang terdiri dari: Ali Fauzi, Anis Yusuf alias Haris dan mantan narapidana lainnya yang juga bagian dari lingkaran terorisme. Tentu, keberadaan mereka tidak lepas dari pengaruh teroris ulung lainnya seperti pimpinan teroris dunia Osaman bin Laden; Iqbal Hussein Thoyib yang merupakan sosok dibalik perencanaan pengeboman Mabes Polri dan pensuplay senjata untuk

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009), 126.

membrangus polisi; dan Sumarno yang merupakan keponakan sekaligus tetangga Ali Fauzi pernah menimbun ribuan senjata untuk tindakan teror di beberapa tempat yang direncanakan.

Para pendiri Lingkaran Perdamaian mempunyai latarbelakang yang berbeda ada yang dilatih di camp militer Afghanistan, camp militer Mindanao, Ambon dan Poso. Setelah keluar dari penjara barulah mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan olehnya adalah hal yang merugikan banyak pihak.¹⁴

Setelah mengalami vonis pidana yang cukup panjang, dari sinilah awal pembentukan YLP itu diinisiasi, Ali Fauzi bersama rekan lainnya membentuk lembaga ini guna memberikan pembinaan bagi mantan narapidana lainnya. YLP didirikan pada 29 November 2016 yang terletak di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Jarak lokasi dari pusat kota sekitar 42 km, juga dapat ditempuh melintasi Kecamatan Sukodadi dengan jarak sekitar 16 km dan 14 km jika melintasi Drajat ke arah selatan.

Sesuai dengan namanya, YLP memiliki harapan membangun perdamaian secara struktural dan berkelanjutan dengan membangun komunikasi pada mereka yang masih terlibat dalam aksi terorisme di Indonesia. Harapan besar dari organisasi ini adalah mereka yang berstatus mantan terorisme mampu menjadi agen perubahan dan perdamaian dalam masyarakat untuk tidak masuk dalam jeratan terorisme melalui kegiatan yang mendorong perubahan positif di masa yang akan datang.

Lingkaran perdamaian didirikan untuk mantan terorisme agar mereka menjadi duta perdamaian lintas sektor di lintas sektor,¹⁵ khususnya berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Selain itu YLP juga memberikan edukasi dengan diselingi kisah masa kelam

¹⁴ Dokumen Profil Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP).

¹⁵ Wawancara Ali Fauzi Yang Merupakan Ketua Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) Di Sekretariat YLP.

mereka yang terjaring anggota teroris, aksi pengeboman, penembakan dan perampokan dengan dalih harta *fai*'.¹⁶

Selain itu, hal paling penting dari berdirinya lembaga ini adalah menyelamatkan mental keluarga napiter dari stigma negatif agar tidak mendapat perlakuan diskriminasi di tengah masyarakat.¹⁷ Jika hal ini dilakukan tanpa pendampingan maka dikhawatirkan keluarga korban menjadi bibit dan poros baru untuk mengikuti jejak kepala keluarganya.¹⁸ Atas keprihatinan itulah, Ali Fauzi yang juga merupakan mantan seorang teroris, berinisiasi mendirikan lembaga yang bergerak dalam kegiatan deradikalisasi di Lamongan, dengan harapan lahirnya agen-agen perubahan dan perdamaian.

¹⁶ Secara terminologi harta *fai*' merupakan harta yang didapat dari non muslim dengan cara damai tanpa peperangan. Adapun harta yang diperoleh dari hasil peperangan disebut dengan *ghanimah*. Perbedaan harta *fai*' diberikan secara sukarela, sedangkan *ghanimah* diidentikan dengan harta rampasan. Dalam isu radikalisme berbasis agama, persoalan harta *fai*' sering disalah artikan dengan perampokan untuk mengambil harta *fai*' dari orang kafir. Sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah; medan perang dan tempat lainnya yang menjadi sasaran perampasan harta dengan dalih harta *fai*'. Mereka menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang "*kafir*" atau thogut, sehingga negara ini adalah medan perang untuk memperjuangkan dan menegakan syariat Islam. Itu artinya, harta yang dimiliki oleh orang non-muslim menjadi halal untuk dimiliki meski didapat dengan cara-cara yang tidak halal.

¹⁷ Ridho Firmansyah, "Rehabilitasi Dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme," *Jurist-Diction*, 2019, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>. Anis Ulfyatun, "Makna Menjadi Keluarga 'Teroris' Bagi Keluarga Tersangka Terorisme Amrozi Dan Ali Ghufron Di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 2015, <https://doi.org/10.20473/mkp.v28i22015.72-81>. J. H. Bangun, "Internalisasi Kesadaran Berbangsa Bernegara Anak Teroris," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2020.34

¹⁸ Zora A. Sukabdi, "Psychological Rehabilitation For Ideology-Based Terrorism Offenders," *International Journal Of Neurorehabilitation*, 2017; Zora A. Sukabdi, "Terrorism In Indonesia: A Review On Rehabilitation And Deradicalization," *Journal Of Terrorism Research*, 2015; Zora A. Sukabdi, "Building Community Resilience: Strategic Role Of Police With Bombing Victims," *Police Practice And Research* 17, No. 2 (March 3, 2016): 160–70, <https://doi.org/10.1080/15614263.2015.1128162>. 23

Strategi Pembinaan Deradikalisasi di YLP

Upaya yang dilakukan oleh YLP dalam program deradikalisasi tentu bukanlah hal mudah. Pendekatan keagamaan yang dilakukan pun tentu bervariasi, masih banyak diantara mereka yang relatif masih keras. Hal ini dimungkinkan pada masa rehabilitasi di penjara kurang maksimal, sehingga benih-benih radikalisme masih bersemayam dalam pikiran mereka. Untuk menyikapi para mantan napiter yang masih belum sepenuhnya melepas ideologi asal mereka, YLP mengedepankan pendekatan yang bersifat dinamis dan humanis, di antaranya:

a. Penguatan Paradigma Inklusif

Sebagaimana tujuan awal didirikannya YLP ini adalah untuk memberikan pembinaan bagi para napiter dan kombatan untuk menjadi lebih baik. Karena pasca-pembebasan pidana semua mantan napiter mendapatkan pandangan yang kurang baik di tengah masyarakat. Mereka menganggap bahwa mantan napiter masih belum sepenuhnya menjadi pribadi yang baik dan dianggap tidak manusiawi. Kesulitan untuk membaaur dengan masyarakat dialami oleh semua napiter, sikap masyarakat yang skeptis inilah yang membuat mantan napiter dan kombatan sulit untuk hidup di lingkungannya. Untuk itulah YLP ini didirikan sebagai jembatan untuk memberikan proses sosialisasi yang optimal.¹⁹

Sebelum mantan teroris berbaur dengan masyarakat, YLP mengarahkan terlebih dahulu untuk diberikan wawasan, pendekatan emosional dan perubahan mindset dari eksklusivisme menuju inklusivisme.²⁰ Sehingga mereka tidak lagi berbuat seolah-olah bahwa dirinya paling benar dalam urusan agama. Setidaknya ada beberapa langkah untuk menginternalisasikan paradigma inklusif bagi mantan napiter; identifikasi napiter, pembinaan kontra

¹⁹ Wawancara Ali Fauzi yang merupakan Ketua Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) di Sekertariat YLP.

²⁰ Wawancara Ali Fauzi yang merupakan Ketua Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) di Sekertariat YLP.

radikalisasi dan evaluasi. Walaupun berbeda dengan lapas yang menggunakan strategi deradikalisasi berupa identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan monitoring,²¹ tahapan lapas lebih panjang namun pada dasarnya kedua lembaga baik lapas maupun YLP sama-sama memiliki harapan agar mantan napiter dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Pendekatan yang dilakukan YLP ini dalam bahasa Abraham Maslow masuk kategori *sefety need*, yakni kebutuhan akan rasa aman. Bahwa kelompok mantan napiter mengalami traumatik yang cukup besar berupa pidana yang cukup lama ditambah lagi mereka harus menyaksikan rekan sejawatnya dihukum mati. Agar kebutuhan rasa aman ini dapat terpenuhi, maka diperlukan iklim yang membimbing mereka ke jalan yang benar, yakni penguatan paradigma inklusif. Dimaksudkan agar rekam jejak masa lalu dapat tergantikan dengan pola pikir yang lebih baik dan mendapatkan rasa aman.

Bagi peneliti *sefety need* merupakan kebutuhan yang paling prioritas kedua setelah kebutuhan pertama (fisiologis) yang harus terpenuhi. Perubahan ideologi juga dapat dipicu oleh ketenangan dan rasa aman yang dialami mantan napiter. Rasa aman ini dimaksudkan bukan untuk melindungi kejahatannya, tetapi aman dari diskriminasi dan stigma buruk dari masyarakat. Sebab jika dibiarkan akan memicu kembali watak radikal dan melakukan tindakan terorisme.

Gagasan Maslow mengenai *sefety of need* menjadi satu keniscayaan yang perlu dilakukan pada tahapan perubahan paradigma seseorang. Seseorang harus merasa aman terlebih dahulu untuk dapat mengaktualisasikan pribadinya menjadi lebih baik. Aman dari segala bentuk intimidasi dan diskriminasi dinilai lebih efektif memunculkan psikis yang positif.

²¹ Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum P-Issn* 1410 (2017): 5632. 54

b. Pembinaan Keluarga Narapidana Teroris

Aksi terorisme tentu memiliki banyak dampak, di antaranya dalam konteks sosio kultural bukan hanya menimbulkan kerugian materi dan hilangnya korban jiwa, rusaknya fasilitas publik dan objek vital, melainkan juga dampak psikis, trauma yang mendalam, disharmoni dan efek lainnya. Penelaahan lebih dalam mengenai isu terorisme tentunya membutuhkan seperangkat pemahaman dari berbagai perspektif yang integratif agar diperoleh hasil yang lebih luas. Sehingga tidak heran konsekuensi bagi pelaku terorisme bukan hanya penahanan saja bahkan hukuman mati sekaligus. Untuk itulah permasalahan ini melibatkan orang-orang terdekat, termasuk keluarga. Pembinaan tentang bagaimana perlakuan terhadap keluarga menjadi satu konsekuensi logis yang perlu ditelusuri dan dikembangkan, mengingat program deradikalisasi harus disinergikan dari hulu ke hilir.²²

Pembinaan keluarga ini dapat dikategorikan sebagai resiliensi, yakni kemampuan untuk beradaptasi bangkit dari segala keterpurukan, lalu berdamai dengan hal positif di tengah kondisi yang tidak menguntungkan dan penuh resiko. Kondisi yang sarat akan stigma, bahkan diskriminasi ini memungkinkan keluarga teroris mendapat tekanan psikis yang cukup tinggi. Hal ini akan berakibat pada distress psikologi, yakni kondisi seseorang yang mengalami emosional dan di tandai dengan depresi; kesedihan, keputusasaan dan hilangnya semangat hidup.²³

Pada tahapan ini, resiliensi keluarga dimaknai sebagai kekuatan anggota untuk pulih dari krisis selama menjalani tantangan dan permasalahan hidup. Resiliensi keluarga ini juga dilakukan dengan memberi *support*, motivasi untuk membangun

²² Muslim Hidayat and Sabiqotul Husna, "Resiliensi Keluarga Teroris A : Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif , Rasa Malu Dan Psychological Distress Sebagai Keluarga Teroris," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10, no. 2 (2021), 160.

²³ John Mirowsky and Catherine E. Ross, *Social Causes of Psychological Distress, Social Causes of Psychological Distress*, (New York, 2017), 115.

kestabilan hidup, menetralsir pengalaman yang menakutkan setelah mengalami krisis.²⁴

YLP didirikan bukan hanya menanggulangi persoalan ideologi mantan terorisme, tetapi juga merangkul anak-anak teroris untuk dibina dan dilibatkan dalam program deradikalisasi. Dari mulai mendidik, mengurus hingga memenuhi kebutuhan sehari-harinya. YLP merasa memiliki sepaket kewajiban pada keluarga mantan napiter yang ditahan atau mati karena hukuman. Untuk itulah YLP membantu mengentaskan masalah ini sebagai wujud kepedulian terhadap mereka. Selain itu, perlindungan ini dilakukan agar mereka merasa aman untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi.²⁵ Karena sejauh ini, sebelum YLP itu berdiri, keluarga pelaku teror selalu mendapat tekanan dan perlakuan intimidasi dalam masyarakat. Bahkan dianggap sebagai sebuah ancaman karena dinilai berpotensi melakukan teror. Perilaku ini tidak hanya berakibat pada psikis anak dan keluarganya, tetapi berakibat fatal karena berpotensi memangkitkan kembali bibit terorisme akibat rasa aman yang tidak terjamin.²⁶

Setidaknya ada beberapa pertimbangan mengapa YLP melakukan pembinaan pada anak-anak napiter yang tentu berbeda dengan penanganan dibawah naungan pemerintah. *Pertama*, stigma negatif yang melekat bagi anak-anak dalam masyarakat. *Kedua*, besarnya keterserapan ideologi radikal yang diajarkan oleh orang

²⁴ Ike Herdiana, "Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi Dan Riset," *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)* 14, no. 1 (2019), 2.

²⁵ Muslim Hidayat And Sabiqotul Husna, "Resiliensi Keluarga Teroris A : Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif , Rasa Malu Dan Psychological Distress Sebagai Keluarga Teroris," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10, No. 2 (2021); Siti Nur Asiyah Et Al., "The Social Discrimination Against Former Terrorist Convicts And Their Families: Psychological Perspectives," *Journal of Indonesian Islam* 8, No. 1 (2014), <https://doi.org/10.15642/jiis.2014.8.1.71-90.31>

²⁶ Sukabdi, "Terrorism In Indonesia: A Review On Rehabilitation And Deradicalization"; Milda Istiqomah, "De-Radicalization Program In Indonesian Prisons: Reformation On The Correctional Institution," 2011, 19.

tuanya, sehingga memungkinkan tumbuhnya bibit baru terorisme. *Ketiga*, peluang mereka untuk direkrut kelompok teroris tersebut sangat besar.²⁷

Untuk itulah YLP mencoba memutus rantai ini dengan mendidik anak-anak dengan pemahaman agama yang benar, sekaligus memberikan kehidupan yang layak. Tindakan ini juga dikatakan sebagai kategori *at risk groups* (kelompok beresiko), anak yang lahir sebab konflik wilayah, anak pelaku teroris atau mereka yang mengalami tindak kekerasan.²⁸ Usia mereka tergolong dini dalam pembentukan jati diri, sehingga sikap labil akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Sejauh ini, jumlah anak asuhan YLP berjumlah 20 orang,²⁹ jumlah ini bisa saja terus bertambah dan YLP dengan senang hati akan melakukan pembinaan bagi mereka.

Maslow mengkategorikan kebutuhan ini sebagai *love and belonging need*, rasa untuk dicintai dan tidak mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Bahwa kegagalan untuk menciptakan iklim rasa cinta dan rasa dimiliki dalam kehidupan sosial adalah alasan terjadinya gangguan emosional atau maladjustment.³⁰

c. Pemulihan Ekonomi

Pasca dibebaskannya dari lapas sudah dipastikan kestabilan ekonomi mereka terancam, jangankan untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi dirinya sendirinya pun terasa

²⁷ Mary Beth Altier, Emma Leonard Boyle, And John G. Horgan, "Returning To The Fight: An Empirical Analysis Of Terrorist Reengagement And Recidivism," *Terrorism And Political Violence* 33, No. 4 (2021), <https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1679781.64>

²⁸ Saleh Dhumad Et Al., "Risk Factors For Terrorism: A Comparison Of Family, Childhood, And Personality Risk Factors Among Iraqi Terrorists, Murderers, And Controls," *Behavioral Sciences Of Terrorism And Political Aggression* 12, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/19434472.2019.1591481.110>

²⁹ Dokumen Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP).

³⁰ Yusuf, S. & Nurihsan, A. J. Landasan Bimbingan dan Konseling. (Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2006), hlm. 206.

sangat sulit.³¹ Sehingga pemulihan ekonomi ini menjadi perhatian khusus bagi YLP untuk membantu meringankan beban mantan napiter untuk bisa bertahan hidup di tengah kesulitan mereka yang berstatus sebagai mantan teroris.³² Karena walau bagaimana pun salah satu indikator seseorang tergabung dalam lingkaran terorisme berakar dari ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.³³ Dititik inilah Ali bersama rekannya mendirikan YLP, karena melihat ekonomi dirinya bersama teman-teman yang kelimpungan dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan karena labelitas eks-teroris masih melekat. Berkat kerja keras Ali, YLP akhirnya meminta kepada pihak kepolisian untuk meyakinkan perusahaan yang akan dilamar oleh anggota YLP melalui surat yang menerangkan bahwa dirinya terbebas dari paham teroris.

Melalui surat tersebut pihak perusahaan tidak perlu merasa takut lagi dengan anggota YLP jika ada yang melamar menjadi karyawan perusahaan. Jika pendirian YLP itu tidak dilakukan, kemungkinan potensi mereka diterima di perusahaan sangatlah kecil.³⁴ Dukungan tertulis tersebut menegaskan bagi perusahaan dimana tempat mantan teroris bekerja untuk tidak takut karena tuduhan membantu teroris apalagi dengan stigma masyarakat. Jaminan ini yang menjadikan anggota YLP mampu bekerja secara

³¹ Wawancara Sumarno Yang Merupakan Bendahara Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) di Sekertariat YLP.

³² Pujiyono And Bambang Sugeng Rukmono, "Ex-Terrorist Deradicalization In Indonesia Through Economic Empowerment," *International Journal Of Advanced Science And Technology* 29, No. 3 (2020); Sugiarto Sugiarto, "Communication Strategy Of The National Counter Terrorism Agency In The Deradicalization Program In Indonesia," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.33172/jpbh.V10i2.898>. 28

³³ Musda Asmara, "Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris," *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016), 63.

³⁴ Wawancara Sumarno Yang Merupakan Bendahara Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) Di Sekertariat YLP.

mandiri, menguatkan ekonominya walau pekerjaan yang didapatinya terbilang kasar.³⁵

Setidaknya jaminan atas kepolisian itu mampu membantu membuka akses pekerjaan, meskipun di beberapa perusahaan lainnya surat tersebut dianggap kurang kuat untuk meyakinkan bahwa mereka terbebas dari jerat terorisme.³⁶ Kasus ini jika dalam argumentasi Maslow masuk kategori *physiological needs* dan *self actualization needs*, kebutuhan yang didasari karena aspek paling dasar dalam diri manusia tidak terpenuhi.³⁷ Selain itu aktualisasi diri juga menjadi alasan perubahan mantan napiter ke arah yang lebih baik.

YLP memperlihatkan komitmen yang cukup bagus untuk mengubah mantan napiter melalui pembinaan dan perlakuan yang manusiawi, melalui perlindungan hak warga negara agar bisa berbaur dan hidup normal bersama masyarakat. Model dalam istilah Khamdan disebut sebagai “bina damai”, dimaksudkan agar lembaga sosial mampu membangun relasi sosial dan ekonomi berupa pelatihan keterampilan agar mantan napiter dapat hidup secara mandiri dan memenuhi kesejahteraannya.³⁸

Memang penanggulangan mantan napiter melalui pemulihan ekonomi bukan kalsifikasi mutlak, mengingat setiap orang berpaham radikal dipengaruhi oleh banyak faktor, sedangkan pemulihan ekonomi satu dari sebagian solusi dari program deradikalisasi. Tentu proses penanggulangan terorisme sangatlah

³⁵ Ahmad Ah. Ali Arifin Jundulloh, “Implementasi Strategi Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Deradikalisasi Terhadap Mantan Napi Terorisme Di Yayasan Lingkaran Perdamaian Kabupaten Lamongan),” *Journal Of Islamic Management* 1, No. 1 (2021).

³⁶ Wawancara Sumarno Yang Merupakan Bendahara Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) Di Sekretariat YLP.

³⁷ Jess Feist, Gregory J. Feist, and Roberts Tomi-Ann, *Theories Of Personality, 9th Edition, McGraw-Hill Education*, (New York: McGraw Hill, 2013).241

³⁸ Muh Khamdan et al., “Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme,” *ADDIN*, vol. 9, 2015.181

beragam, tergantung sekuat apa doktrin yang diyakininya dan siapa yang melakukannya. yang jelas deradikalisasi harus dilakukan secara terukur, sistematis dan berkesinambungan sampai akar-akarnya. Tanpa itu, selamanya bibit-bibit terorisme akan berkembang dan mengancam kedaulatan negara.

Implikasi Strategi Deradikalisasi di YLP

Keberhasilan YLP terbilang sangat efektif melalui program deradikalisasi berbasis humanisme, menjadikan manusia seutuhnya melalui program-program yang terbilang cukup berat di tengah ancaman dari kelompok simpatisan ISIS. Keberhasilan tersebut berimplikasi pada dua hal; *pertama*, kembali pada NKRI. *Kedua*, sikap toleransi beragama.

1. Kembali Pada NKRI

Keberhasilan YLP melalui deradikalisasi dan deteriorisme ini melahirkan harapan baru dalam bentuk kesadaran untuk mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tanah Air mereka. Perjuangan untuk mengakui NKRI ini membutuhkan proses dan dialektika yang begitu panjang. Bahkan perjalanannya pun diselingi dengan ancaman dari kelompok ISIS. Keberhasilan YLP dalam mengikrarkan mantan anggota teroris bukan hanya terjadi di lamongan, tetapi juga beberapa wilayah di Indonesia.³⁹

Kembalinya mantan napiter harus dibuktikan secara konkrit, sehingga mereka menunjukkan hal tersebut dengan turut andil dalam kegiatan-kegiatan nasionalisme; upacara bendera, perayaan 17 agustus hingga kegiatan refleksi hari-hari bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada sedikitpun paksaan, mereka hanya ingin membuktikan bahwa YLP beserta anggotanya akan tetap memperjuangkan NKRI. Sikap nasionalisme dalam kegiatan ini sengaja dilakukan semata-mata bentuk ketundukan dan kecintaan

³⁹ Wawancara Ali Fauzi Yang Merupakan Ketua Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) Di Sekertariat YLP.

terhadap negara.⁴⁰ Karena selama ini mereka tidak pernah menunjukkan sikap hormat terhadap negara, mereka hanya menilai bahwa negara tidak lebih dari sistem yang *kufur* dan tidak sesuai dengan ajaran agama.

Karena itu, tujuan utama dari deradikalisasi tidak sekedar mengikis ideologi radikalisme yang berpotensi melakukan melakukan terorisme, yang lebih utama adalah bagaimana mengaktualisasikan empat pilar hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan cita-cita nasional.⁴¹

2. Sikap Toleransi Beragama

Selain kembalinya mereka pada NKRI, perubahan cara beragama mereka juga harus turut diperhatikan. Sebab diantara mereka melakukan tindak terorisme karena pemahaman agama yang kaku dan terkesan tekstual.⁴² Doktrinasi paradigma radikal itu begitu kuat diyakini sebagai kebenaran yang tunggal. Sementara kelompok radikal akan terus mengakomodir kekuatannya untuk menyebarkan paham-paham ekstrimisme-terorisme dan menguasai dunia.

Deradikalisasi harus dilakukan dengan *soft line approach* untuk mengubah paradigma jihadis, skriptual dan eksklusif yang menitikberatkan pada penyembuhan psikologi. Selain itu di perlukan juga *disengagement* yang juga *soft line approach* lain yang diorientasikan pada relasi sosial agar mereka tidak kembali mengulangi kejahatan yang sama.⁴³

⁴⁰ Wawancara Ali Fauzi Yang Merupakan Ketua Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) di Sekertariat YLP.

⁴¹ Ismail Hasani, "Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & DI Yogyakarta," 2012, 31.

⁴² Khalid Rahman dan Aditia Muhammad Noor, *Moderasi Beragama Di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstrimisme* (Universitas Brawijaya Press, 2020), 154.

⁴³ Ulfa Khaerunisa Yanuarti, "Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia," *Law Reform* 10, no. 1 (2014), 84.

Setelah menjalankan program deradikalisasi YLP, banyak perubahan yang terjadi di setiap individu mantan teroris. Perubahan itu tentu didasari karena banyak faktor, mulai dari benturan ideologi, ekonomi, hingga diskriminasinya anak dan keluarga mereka. Untuk itulah strategi YLP mengambil peran tersebut dirasa tepat karena persoalan diatas menunjukkan bahwa mereka akan hidup nyaman tanpa tekanan jika faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan. Tetapi meskipun YLP dan anggotanya telah berikrar dan berjanji tidak akan mengkhianati negara dan menyalahgunakan agama, kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih sangat minim, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi YLP.

Perubahan individu dari mantan teroris ini adalah akumulasi dari ketercukupan kebutuhan yang berdampak pada perubahan secara total dari ekstrimis menuju pribadi toleran. Deradikalisasi yang ideal tidak sekedar mengubah ideologi, tetapi bagaimana lembaga, instansi maupun komunitas mampu memfasilitasi kebutuhan mereka pasca pidana. Karena sudah dipastikan mereka mengalami traumatik dan tidak akan kembali pada masa lalu.

Perilaku agresif dan ekstrim mereka harus diarahkan pada motivasi yang lebih positif, disisi lain memberi pengetahuan agama yang toleran atau pengetahuan yang dapat menambah cakrawala berpikir mereka sekaligus membentuk pribadi yang mandiri.⁴⁴ Hal inilah yang diyakini bahwa deradikalisasi humanis adalah mengangkat martabat manusia kearah yang lebih baik. Konsep yang digagas oleh Maslow merupakan pendekatan yang cukup ideal jika diterapkan di lembaga pembinaan terorisme, baik lapas maupun organisasi seperti YLP. Untuk bisa mengaktualisasikan diri mencapai perubahan yang positif harus diimbangi dengan kebutuhan yang tercukupi, tidak sekedar *brainwashing* yang diutamakan.

⁴⁴ Petrus Reinhard Golose, "Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput," (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian), 2009, 201.

Penutup

Strategi perubahan YLP memang berbeda dengan lembaga rehabilitasi lainnya dalam menyelenggarakan deradikalisasi. YLP melakukan perubahan mantan terorisme dengan sangat humanis yang disandarkan pada pendekatan Abraham Maslow mengenai *hierarchy of need*. Adapun langkah strategis yang dilakukan YLP adalah; penguatan paradigma inklusif, pendampingan keluarga dan pemulihan ekonomi.

Ketiga strategi tersebut akan berimplikasi pada dua hal; yakni mengakui NKRI sebagai negara yang sah dan sikap toleransi beragama. Pengakuan terhadap NKRI ini dibuktikan dengan keterlibatan mereka mengikuti serangkaian kegiatan perayaan negara, seperti; upacara bendera dan kegiatan 17 Agustus. Sementara sikap toleransi dapat dilihat dari cara menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan beragama lain.

Daftar Pustaka

- Ahmad Nurcholish, Alamsyah. *Agama Cinta-Menyelami Samudera Cinta Agama-Agama*. Elex Media Komputindo, 2015.
- Altier, Mary Beth, Emma Leonard Boyle, and John G. Horgan. "Returning to the Fight: An Empirical Analysis of Terrorist Reengagement and Recidivism." *Terrorism and Political Violence* 33, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1679781>.
- Asiyah, Siti Nur, Nailatin Fauziyah, Siti Khorriyatul Khotimah, and Soffy Balgies. "The Social Discrimination against Former Terrorist Convicts and Their Families: Psychological Perspectives." *Journal of Indonesian Islam* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2014.8.1.71-90>.
- Asmara, Musda. "Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- Bakashmar, Muhammad R. "Extremist Deradicalisation Programmes: A Comparative Perspective." *International Journal of Political Science, Law and International Relations*, 2015.

- Bangun, J. H. “Internalisasi Kesadaran Berbangsa Bernegara Anak Teroris.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2020.
- Bauto, Laode Monto. “Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama).” *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 2016. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616>.
- Dhumad, Saleh, Philip J. Candilis, Sean D. Cleary, Allen R. Dyer, and Najat Khalifa. “Risk Factors for Terrorism: A Comparison of Family, Childhood, and Personality Risk Factors among Iraqi Terrorists, Murderers, and Controls.” *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* 12, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1080/19434472.2019.1591481>.
- Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Obor, 2010.
- Evans, Olaniyi, and Ikechukwu Kelikume. “The Impact of Poverty, Unemployment, Inequality, Corruption and Poor Governance on Niger Delta Militancy, Boko Haram Terrorism and Fulani Herdsmen Attacks in Nigeria.” *International Journal of Management, Economics and Social Sciences* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32327/ijmess/8.2.2019.5>.
- Feist, Jess, Gregory J. Feist, and Roberts Tomi-Ann. *Theories Of Personality*, 9th Edition. McGraw-Hill Education, 2013.
- Firdaus, Insan. “Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2017): 5632.
- Firmansyah, Ridho. “Rehabilitasi Dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme.” *Jurist-Diction*, 2019. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>.
- Gardeazabal, Javier. “Terrorism and Poverty.” *In International Relations*, 2020. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199743292-0296>.
- Golose, Petrus Reinhard. “Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumpun,” 2009.
- Hasani, Ismail. “Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi Dan

Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & DI Yogyakarta, 2012.

- Herdiana, Ike. "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi Dan Riset." *Psikosains* (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi) 14, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.30587/psikosains.v14i1.889>.
- Hidayat, Muslim, and Sabiqotul Husna. "Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu Dan Psychological Distress Sebagai Keluarga Teroris." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10, no. 2 (2021).
- Indrawan, Jerry, and M. Prakoso Aji. "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>.
- Iskandar. *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*. Jakarta: Gaung Persada Pers, 2009.
- Istiqomah, Milda. "De-Radicalization Program in Indonesian Prisons: Reformation on the Correctional Institution," 2011.
- Jundulloh, Ahmad Ah. Ali Arifin. "Implementasi Strategi Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Deradikalisasi Terhadap Mantan Napi Terorisme Di Yayasan Lingkaran Perdamaian Kabupaten Lamongan)." *Journal of Islamic Management* 1, no. 1 (2021).
- Khamdan, Muh, Kata Kunci, : *Radikalisasi, and Bina Damai. "Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme."* ADDIN. Vol. 9, 2015.
- Mirowsky, John, and Catherine E. Ross. *Social Causes of Psychological Distress. Social Causes of Psychological Distress*, 2017.
<https://doi.org/10.4324/9781315129464>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Noor, Aditia Muhammad. "Pendidikan Islam Rahmat Li Al-'Alamin Dan Implikasinya Terhadap Karakter (Studi Pesantren Metal Mulim Al-Hidayah Pasuruan)." *Jurnal Penelitian Pendidikan*

- Islam 9, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.603>.
- Pujiyono, and Bambang Sugeng Rukmono. "Ex-Terrorist Deradicalization in Indonesia through Economic Empowerment." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 3 (2020).
- Rahman, Khalid, and Aditia Muhammad Noor. *Moderasi Beragama Di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Ramli, Rafika Nurul Hamdani. "The Eradication of Terrorism Acts: Effectiveness and Human Rights Violation." *International Journal of Global Community*, 2018.
- Salihu, Hamisu. "Is Boko Haram a 'Child' of Economic Circumstances?" *International Journal of Social Economics* 45, no. 8 (2018). <https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2017-0573>.
- Sugiarto, Sugiarto. "Communication Strategy Of The National Counter Terrorism Agency In The Deradicalization Program In Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.898>.
- Sukabdi, Zora A. "Psychological Rehabilitation for Ideology-Based Terrorism Offenders." *International Journal of Neurorehabilitation*, 2017.
- . "Terrorism In Indonesia: A Review On Rehabilitation And Deradicalization." *Journal of Terrorism Research*, 2015.
- Sukabdi, Zora A. "Building Community Resilience: Strategic Role of Police with Bombing Victims." *Police Practice and Research* 17, no. 2 (March 3, 2016): 160–70. <https://doi.org/10.1080/15614263.2015.1128162>.
- Syaugi, Syaugi, Badrian Badrian, and Faisal Mubarak. "Peran Kearifan Lokal Dalam Upaya Deradikalisasi Fahaman Radikal Di Kalimantan Selatan." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (2020): 155–72.
- Ulfyatun, Anis. "Makna Menjadi Keluarga 'Teroris' Bagi Keluarga Tersangka Terorisme Amrozi Dan Ali Ghufron Di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan."

Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 2015.
<https://doi.org/10.20473/mkp.v28i22015.72-81>.

Yanuarti, Ulfa Khaerunisa. “Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia.” *LAW REFORM* 10, no. 1 (2014).
<https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12459>.

Zelenkov, Mikhail, Elena Kruglova, Lyubov Ryabchikova, Mikhail Kibakin, and V. Remarchuk. “How to Lower the Possibility of Terrorism Development in Democratic Society?” *Justicia* 26, no. 39 (2021). <https://doi.org/10.17081/just.26.39.4909>.